

Konstruksi Predominant Leader dalam Kebijakan Moon Jae In terhadap Jepang dalam isu Comfort Women pada Tahun 2017-2022

Arizki Putri Candelaria¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia, 60237
arizkiputri4@gmail.com

ABSTRACT

Comfort Women refers to the practice of forced sexual services on thousands of women by Japanese soldiers during World War II. This issue has been a source of tension in relations between South Korea and Japan for several years. In this research, the concept of "predominant leader" is used as a lens for analyzing the role played by President Moon Jae-in in making various policies related to this issue. The method used is descriptive-qualitative with literature study techniques, and the data used is secondary data originating from books, journals, and official websites. This research includes an analysis of several of Moon Jae In's foreign policies towards Japan, such as efforts to register the history of comfort women at UNESCO, demands for compensation against Japanese companies, withdrawal from GSOMIA, and the dissolution of the Reconciliation and Healing Foundation. The results of this research illustrate the complexity of the comfort women issue, with emphasis on 'goal-driven' and 'situationally responsive' aspects when it comes to policies issued in his effort to seek justice for the victims.

Keywords: *Comfort Women*, Japan, Moon Jae In, Policy, South Korea

ABSTRAK

Comfort Women mengacu pada praktik pemaksaan layanan seksual oleh tentara Jepang terhadap ribuan wanita selama Perang Dunia II. Isu ini telah menjadi sumber ketegangan dalam hubungan antara Korea Selatan dan Jepang selama beberapa tahun. Dalam penelitian ini, konsep "Predominant Leader" digunakan sebagai kacamata analisis peran yang dimainkan oleh Presiden Moon Jae In dalam pembuatan berbagai kebijakan terkait isu ini. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan studi literatur, dan data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari buku, jurnal dan situs resmi. Penelitian ini mencakup analisis beberapa kebijakan luar negeri Moon Jae In terhadap Jepang, seperti upaya untuk mendaftarkan sejarah *comfort women* di UNESCO, tuntutan ganti rugi terhadap perusahaan Jepang, penarikan diri dari GSOMIA, dan pembubaran Reconciliation and Healing Foundation. Hasil penelitian ini menggambarkan kompleksitas isu *comfort women*, dengan penekanan pada aspek 'goal-driven' dan 'situationally responsive' dalam kebijakan yang dikeluarkan bersamaan dengan upayanya mencari keadilan bagi para korban.

Kata Kunci: *Comfort Women*, Jepang, Moon Jae In, Kebijakan, Korea Selatan.

LATAR BELAKANG

Comfort Women merupakan salah satu isu yang pernah menjadi topik kontroversial hingga memicu ketegangan dalam hubungan antara Korea Selatan dan Jepang selama beberapa tahun. *Comfort Women* merujuk kepada wanita-wanita yang dipaksa oleh tentara Jepang untuk memberikan layanan seksual selama Perang Dunia II (Soh, 2003). Pada Desember 2011, dalam KTT antara Korea Selatan dan Jepang, Presiden Korea Selatan pada saat itu, Presiden Lee Myung-bak meminta pemerintah Jepang untuk bertanggung jawab mengatasi masalah *comfort women* dalam bentuk pemberian kompensasi. Selanjutnya pada tahun 2012, Presiden Lee Myung-bak

kembali meminta Kaisar Jepang untuk mengunjungi kuburan warga Korea yang meninggal saat memperjuangkan kemerdekaan dan dengan tulus menyampaikan permintaan maaf jika ingin berkunjung ke Korea (Ser, 2012). Kemudian, pada tahun yang sama, pemerintah Jepang secara tidak resmi mengusulkan solusi kemanusiaan yang dikenal sebagai Proposal *Sasae*, yang dikemukakan oleh wakil menteri luar negeri Kenichiro Sasae. Proposal tersebut mengusulkan agar duta besar Jepang mengunjungi para korban *comfort women* dan mengimplementasikan program dukungan melalui anggaran pemerintah Jepang (Asahi Digital, 2014). Namun, tawaran ini ditolak oleh pemerintah Korea Selatan, yang berpendapat bahwa proposal tersebut harus disetujui secara konsensus oleh korban *comfort women*, kelompok pendukung dan lainnya. (Asahi Digital, 2014). Pada akhir tahun 2012, upaya negosiasi kembali dilakukan, tetapi tidak menghasilkan kemajuan apapun. Pada Maret 2014, Shinzo Abe menyatakan bahwa Jepang tidak akan mencabut atau mengubah permintaan maaf dan pernyataan sebelumnya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Jepang mengenai isu *Comfort Women*. Pertemuan bilateral tingkat Direktur Jenderal kedua negara telah dilakukan sebanyak 12 putaran mulai 16 April 2014 untuk membahas isu *comfort women* (Reuters, 2014), semua pada masa pemerintahan Park Geun-hye.

Sejak isu ini mencuat di Korea Selatan pada tahun 1992, akhirnya Jepang dan Korea Selatan berhasil mencapai kesepakatan melalui sebuah perjanjian pertama dikenal sebagai *Comfort Women Agreement* yang dianggap final dan tidak dapat dibatalkan pada tahun 2015. Isi dari perjanjian tersebut adalah sebagai berikut (BBC News, 2015):

- Jepang akan memberikan 1 miliar yen untuk dana bagi wanita penghibur lanjut usia, yang akan dikelola oleh pemerintah Korea Selatan
- Uang tersebut juga disertai dengan permintaan maaf dari perdana menteri Jepang dan penerimaan “tanggung jawab yang mendalam” atas masalah ini
- Korea Selatan mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan masalah ini diselesaikan secara final dan tidak dapat diubah jika Jepang memenuhi janjinya
- Korea Selatan juga akan mempertimbangkan untuk menghapus patung yang melambangkan wanita penghibur, yang didirikan oleh para aktivis di luar kedutaan Jepang di Seoul pada tahun 2011.
- Kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling mengkritik mengenai masalah ini di komunitas internasional

Sesuai dengan perjanjian tersebut, Korea Selatan sepakat untuk mengelola dana kontribusi yang diberikan oleh pemerintah Jepang dengan mendirikan sebuah yayasan yang dikenal dengan nama *Reconciliation and Healing Foundation*. Tugas utama yayasan ini adalah memberikan dana kompensasi kepada para korban *comfort women* dalam proses penyembuhan luka psikologis mereka (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2015). Meskipun *Comfort Women Agreement* dan pendirian yayasan ini merupakan pencapaian penting, respons dari masyarakat dan para korban *comfort women* di Korea Selatan masih cukup negatif. Hal ini tercermin dalam bentuk protes dan demonstrasi yang dilakukan sebagai ungkapan ketidakpuasan mereka, yang pada akhirnya berujung pada pembubaran yayasan tersebut. Sentimen negatif ini diakibatkan oleh sikap Park Geun-hye yang secara sepihak menyetujui perjanjian tersebut tanpa berkonsultasi dengan para korban. Hal ini bertentangan dengan komitmen Park untuk membela

'martabat' para korban dan mendesak agar penyelesaian dilakukan secara sehat (K. Lee, 2017, p. 20). Kemudian, hal tersebut berkaitan dengan keinginan para korban agar semua yang bertanggung jawab atas praktik *comfort women* diberi hukuman yang tegas, bukan hanya permintaan maaf dan pengakuan (Lalitya, 2020, p. 639).

Adanya transisi kepemimpinan dari Presiden Park Geun Hye ke Moon Jae In mencerminkan perbedaan sikap dalam penanganan isu *comfort women*. Moon Jae In, yang merupakan presiden pertama Korea Selatan dengan pandangan liberal setelah sembilan tahun pemerintahan partai konservatif yaitu Partai Kebebasan Korea atau Liberty Korea Party (dahulu bernama Partai Saenuri & Hannara), membawa pendekatan yang berbeda dalam menghadapi masalah ini (The Straits Times, 2017). Dengan latar belakang sebagai seorang ahli hukum dan pengacara hak asasi manusia, Moon menunjukkan sikap yang lebih tegas dalam menyelesaikan isu *comfort women*. Sebagai tindakan simbolis, Moon bahkan menetapkan tanggal 14 Agustus sebagai hari peringatan bagi para penyintas *comfort women* untuk pertama kalinya sebagai bentuk perhatian yang lebih besar terhadap mereka (VOA Indonesia, 2020). Sehubungan dengan *Comfort Women Agreement 2015*, pemerintahan Moon meninjau ulang perjanjian tersebut, dimana beliau bertujuan untuk mencari keadilan prosedural bagi para korban yang masih hidup (Arrington, 2018). Tim peninjau juga menemukan bahwa perjanjian tersebut tidak melibatkan pihak korban pada masa pemerintahan Park Geun-hye. Selain hal tersebut, Moon mengundang para korban *comfort women* ke Gedung Biru dan meminta maaf secara resmi atas tindakan yang dilakukan pemerintahan sebelumnya (Arrington, 2018).

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, dan serangkaian perjanjian antar negara mengenai isu *comfort women* (perjanjian bilateral tahun 1965, pernyataan Kono tahun 1993, pendirian Asian's Women Fund tahun 1994, pernyataan Murayama tahun 1995) (Debates, 2022), Korea Selatan dan Jepang masih terus diliputi oleh bayangan isu *comfort women*, karena langkah-langkah yang telah diambil belum mampu memberikan manfaat yang cukup bagi para korban, sementara usia para korban semakin lanjut, yang menunjukkan perlunya tindakan lebih efektif dalam menyelesaikan isu tersebut. Sejak kepemimpinan Moon Jae In mulai dari tahun 2017, isu ini kembali diangkat melalui kebijakan-kebijakannya yang tegas terhadap Jepang, hingga menciptakan ketegangan di antara dua negara.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis beberapa kebijakan Presiden Moon Jae In sebagai aktor yang memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan yang tepat untuk masyarakatnya, khususnya dalam upayanya mengatasi isu *Comfort Women*. Seorang pemimpin, dengan latar belakang dan karakteristik tertentu, memiliki dampak besar dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam tahap awal maupun dalam aspek yang lebih rumit, yang tak lepas dari faktor-faktor yang ada di sekitarnya. Asumsi awal adalah kehadiran latar belakang Moon Jae In sebagai lulusan hukum, serta aktivis dan pengacara hak asasi manusia memiliki dampak yang signifikan pada kebijakan yang diterapkan olehnya sebagai pemimpin, karena hal ini sangat berkaitan dengan kepribadian Moon Jae In sebagai individu. Biasanya, orang yang mempunyai latar belakang demikian akan lebih baik dalam mendebatkan isu, berpolitik dan urusan kenegaraan, karena banyak keterkaitannya dengan hukum. Latar belakang hukum ini membantu dalam membaca, menganalisis serta mengimplementasikan sebuah kebijakan. Penelitian ini mengangkat pertanyaan berikut sebagai rumusan masalah:

Bagaimana konstruksi *predominant leader* dalam kebijakan Moon Jae In terhadap Jepang dalam isu *comfort women*?

TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sehubungan dengan isu "Comfort Women" di Korea Selatan telah memberikan wawasan yang berharga mengenai dinamika dan konflik terkait untuk penulisan artikel ini. Pertama, artikel Haesel Kim yang berjudul "Contending Narratives on the 'Comfort Women' Issue in South Korea and Japan" yang mengeksplorasi narasi tentang isu *comfort women* di Korea Selatan dan Jepang. Dengan menggabungkan konsep nasionalisme dan feminisme yang ditemukan dalam narasi, penelitian ini tidak hanya menjelaskan perbedaan pandangan antara pemerintah, NGOs, akademisi, dan publik tentang isu tersebut, tetapi juga bagaimana hubungan di antara mereka (Kim, 2015). Nasionalisme dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Jepang sebagai musuh utama mapu menyatukan masyarakat untuk melawannya, dimana hal tersebut membuat negara terlalu fokus dengan penyelesaian masalah eksternal. Namun, peristiwa tersebut mengabaikan isu yang terjadi dalam negeri, yaitu LSM mengkritik bukan hanya Jepang, namun pemerintah Korea Selatan sendiri karena tidak bisa melaksanakan tugasnya. Sedangkan feminisme dapat meningkatkan kesadaran atas isu *comfort women*, dengan kerjasama kelompok pendukung Korea Selatan dan Jepang, serta menggabungkan isu tersebut dengan isu sosial lainnya yang sedang terjadi di Jepang (Kim, 2015).

Penelitian ini juga melihat bagaimana berbagai narasi diperbaharui dan disampaikan melalui berbagai media seperti museum, situs memorial, buku teks sejarah, dan internet serta bagaimana hal ini memengaruhi persepsi publik terhadap isu *comfort women*. Secara keseluruhan, penelitian ini menginterpretasikan debat yang rumit seputar isu *comfort women* di Korea Selatan dan Jepang sejak diperkenalkannya isu ini kepada publik pada tahun 1990-an, dengan fokus khusus pada *Comfort Women Agreement* yang ditandatangani oleh kedua pemerintah pada 28 Desember 2015 (Kim, 2015).

Berbeda dengan penelitian di atas, penulis akan lebih berfokus pada pandangan dari salah satu aktor yaitu Presiden, Moon Jae In sebagai unit analisis, sehingga fokus penelitian yang akan dikaji lebih dalam yaitu mengenai konstruksi beliau sebagai *predominant leader*. Penulis juga menggunakan konsep *predominant leader* untuk menjelaskan kebijakannya terhadap Jepang dalam mengatasi isu *comfort women*. Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menggambarkan secara detail peran penting presiden sebagai pengambil keputusan dalam upaya mencari solusi yang sesuai bagi masyarakat dan kebijakannya terhadap Jepang terkait isu sensitif ini.

Kedua, artikel yang berjudul "Implikasi Penanganan Masalah *Comfort Women* terhadap Hubungan Jepang dan Korea Selatan pada Tahun 2015-2019" oleh Jeniffer Gracellia. Penelitian ini berfokus pada kebijakan luar negeri Korea terhadap Jepang yang diimplementasikan pemerintah pada periode tahun 2015-2019, semasa Presiden Park Geun-hye (2013-2017) dan Moon Jae In (2017-2022) untuk mengatasi isu *comfort women*. Kebijakan yang diterapkan adalah penandatanganan *Comfort Women Agreement*, tetapi berujung membuat hubungan negara memburuk dan Korea membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak. Implikasi dari peristiwa tersebut adalah perang darang Jepang-Korea Selatan pada tahun 2019, mundurnya Korea dari

General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) dan boikot barang-barang Jepang yang dilakukan masyarakat Korea. Penelitian ini menggunakan teori konstruktivisme, dimana *output* dari sebuah kebijakan adalah berdasarkan para aktor pengambil keputusan dan persepsi masing-masing pihak terhadap sebuah isu. Selain itu, peneliti juga menggunakan konsep *comfort women*, konsep hak asasi manusia, konsep hubungan bilateral dan konsep kebijakan luar negeri (Gracellia, 2020).

Penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya meliputi topik *comfort women* dan analisis pengambilan kebijakan terhadap Jepang. Jika dilihat, penelitian di atas membahas pemerintah secara umum, namun perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada analisis unit individu, yaitu Moon Jae In secara khusus. Selanjutnya, penulis menggunakan konsep *predominant leader* untuk membangun argumentasi bagaimana seorang pemimpin dapat mengambil keputusan berdasarkan tujuan atau berorientasi pada situasi dan konteks.

Ketiga, artikel dengan judul “Analisis Sikap yang Diambil oleh Pemerintah Korea Selatan pada Masa Presiden Park Geun Hye Terkait dengan Isu *Comfort Women*” oleh Galuh Kinnari Lalitya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan Presiden Park dalam menandatangani perjanjian *Comfort Women* pada tahun 2015, setelah sebelumnya telah mengkritik dan mendesak pemerintah Jepang. Hasilnya adalah perjanjian tersebut dilaksanakan karena keadaan sistem internasional yang membuat Korea Selatan merasa ketakutan dan harus berlaku agresif. Penandatanganan perjanjian tersebut dijalankan atas dasar keperluan *balance of power* (atau dalam kata lain, kerjasama dengan Jepang) untuk menahan serangan dan ancaman dari Tiongkok dan Korea Utara, serta tekanan dari Amerika Serikat (Lalitya, 2020). Persamaan dengan penelitian ini adalah isu *comfort women*, namun perbedaannya terletak pada analisis mengenai Moon Jae In sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan terhadap Jepang.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menganalisis kebijakan Presiden Moon Jae In terhadap Jepang dalam isu *comfort women*. Metode ini didasarkan pada *library research* dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan secara deduktif. Penelitian dimulai dengan mencari dan mengumpulkan berbagai referensi yang relevan, lalu melakukan analisis deskriptif yang mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian mencakup buku, artikel, jurnal ilmiah, koran cetak dan elektronik yang dianggap kredibel dan relevan terhadap topik penelitian, dokumen, jurnal internasional, dan berbagai sumber informasi lainnya. Fokus pengumpulan data penulis termasuk situs web resmi pemerintah Korea Selatan dan China, rilis pers yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan portal berita yang melaporkan secara langsung mengenai isu *comfort women*. Setelah data terkumpul, data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian akan dipilah dan dikelompokkan berdasarkan variabel yang akan diteliti, dimana proses ini disebut dengan reduksi data. Kemudian, setelah melakukan pengumpulan data, peneliti akan melanjutkan dengan proses penyajian data dan verifikasi data sesuai teknik analisis model interaktif Miles & Huberman (Sugiyono, 2013).

KERANGKA KONSEP

PREDOMINANT LEADERS

Margaret G. Hermann, dkk. mendefinisikan konsep *predominant leaders* sebagai pemimpin tunggal atau individu yang memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan mengenai bagaimana suatu negara akan merespons masalah kebijakan luar negeri. *Predominant leaders* dikategorikan dalam dua tipe gaya kepemimpinan, yaitu yang berorientasi pada tujuan (*goal driven*) dan yang responsif terhadap situasi atau konteks tertentu. Pemimpin dengan gaya berorientasi pada tujuan, sering disebut sebagai "*the crusaders*" atau "*the ideologues*," karena mereka memiliki visi atau gagasan yang kuat yang mendorong mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka ini berfokus pada perubahan, dengan kemampuan untuk mengubah situasi sekitar mereka. Mereka melihat dan memahami lingkungan mereka melalui lensa keyakinan, motivasi, perilaku, dan semangat yang kuat terkait dengan tujuan atau visi yang mereka kejar. Mereka seringkali penuh tekad, sangat berkomitmen terhadap misi atau visi mereka, dan menggunakan keyakinan dan semangat mereka untuk mengatasi rintangan dan tantangan dalam mencapai tujuan mereka. Dengan kata lain, pandangan mereka tentang lingkungan didasarkan pada keyakinan dan semangat mereka dalam mencapai tujuan. Pemimpin semacam ini cenderung hidup dalam keyakinan diri yang didasarkan pada siapa mereka dan apa yang ingin mereka capai (Hermann et al., 2001).

Selanjutnya, pemimpin dengan orientasi pada situasi (*situationality responsive*) adalah mereka yang cenderung merespons dengan cepat terhadap kondisi yang berubah-ubah atau lebih peka terhadap situasi yang tengah berlangsung. Mereka bersifat pragmatis, oportunistik, dan cenderung berfokus pada hubungan atau interaksi saat bernegosiasi. Pemimpin seperti ini memandang kehidupan sebagai panggung yang dapat diisi oleh berbagai peran, mirip penyair yang melihat kehidupan sebagai pertunjukan yang dapat diperankan oleh banyak orang. Mereka mengadaptasi perilaku mereka sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi, memahami perspektif orang lain dalam suatu masalah, dan mampu memprediksi cara kelompok dan institusi akan bertindak. Pada intinya, citra diri seorang pemimpin ditentukan oleh sejauh mana dia mempertimbangkan kepentingan dan keinginan orang lain (Hermann et al., 2001).

Berdasarkan konsep *predominant leaders* yang telah diuraikan oleh Hermann dkk., penulis menganggap bahwa konsep tersebut relevan untuk menganalisis masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Konsep ini memungkinkan kita untuk memahami peran pemimpin yang mendominasi dalam proses pembuatan kebijakan negara, serta menyajikan kerangka untuk menggambarkan berbagai jenis kepemimpinan yang dimiliki oleh individu dan bagaimana peran pemimpin dalam perannya sebagai aktor politik yang memiliki pengaruh besar. Dari 2 jenis orientasi kepemimpinan akan membantu dalam menjelaskan bagaimana peran kepemimpinan Moon Jae In dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan isu *Comfort Women*, termasuk dalam memahami responnya terhadap masalah historis yang belum terselesaikan dan bagaimana dia mencapai tujuan yang diinginkan bagi Korea Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BACKGROUND MOON JAE IN

Moon Jae-in lahir di tahun 1953 di Pulau Geojedo, dekat kota pelabuhan Busan di wilayah tenggara Korea Selatan. Orang tuanya merupakan pengungsi dari kota Hungnam, Korea Utara yang tiba di Provinsi Gyeongsang Selatan pada tahun 1950, semasa Perang Korea dan harus menghadapi kondisi hidup yang sulit. Walaupun demikian, Moon berhasil meraih prestasi di sekolah dan kesuksesannya membuka jalan menuju karirnya. Pada tahun 1970-an, ia mengejar studi hukum di Universitas Kyung Hee di Seoul dan lulus ujian negara yang memungkinkannya untuk bekerja sebagai seorang pengacara dan pegawai negeri. Awalnya, Moon bercita-cita menjadi seorang hakim, tetapi karena keterlibatannya dalam demonstrasi selama masa pemerintahan militer Park Chung-hee, bahkan hingga dipenjara, ia tidak dapat mengikuti jalur tersebut. Akhirnya, ia memilih untuk berpraktik sebagai pengacara (Jung, 2017).

Pada awal tahun 1980-an, Moon bertemu dengan Roh Moo-hyun, yang kemudian terpilih sebagai presiden dari golongan liberal. Moon dan Roh berkolaborasi dalam praktik hukum yang umumnya menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia dan mewakili buruh dalam sengketa hukum. Hubungan mereka bukan hanya sebatas profesional, tetapi juga bersifat pribadi, dan keduanya memiliki pandangan politik yang serupa. Ketika Roh menjabat sebagai presiden, Moon diangkat sebagai kepala staf di Kantor Presiden, yang menjadi pengalaman politik praktis pertamanya. Setelah masa kepemimpinan Roh berakhir, Moon kemudian menjadi ketua partai oposisi terbesar dan akhirnya mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2012. Lima tahun pengalamannya di Kantor Presiden dan lima tahun memimpin partai oposisi adalah modal berharga yang membantunya saat ia memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai presiden (Mosler, 2017).

Meskipun menghadapi banyak tantangan selama Perang Korea dan penangkapan selama demonstrasi di bawah pemerintahan militer, Moon tetap memiliki tekad untuk mengejar karir sebagai seorang hakim, sebuah tujuan yang mencerminkan keyakinannya yang kuat akan keadilan dan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kepribadian Moon mencerminkan sifat seorang pemimpin yang memiliki karakteristik "*goal driven*" dengan visi yang kuat untuk mencapai tujuannya. Selain itu, Moon juga memperlihatkan karakteristik seorang pemimpin yang "situationally responsive" dalam perjalanan karirnya. Ketika ia menghadapi kendala yang mencegahnya menjadi seorang hakim karena keterlibatan masa lalunya dalam demonstrasi dan masa penjara, ia dengan bijaksana memutuskan untuk mengejar karir sebagai seorang pengacara lalu dan memasuki dunia politik sebagai kepala staf presiden. Hal ini menunjukkan kemampuannya untuk menyesuaikan jalur karirnya dan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah.

Berbekal latarbelakangnya sebagai seorang pengacara yang aktif menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia dan mewakili pekerja dalam konflik hukum, Moon Jae-in tentu memiliki pandangan yang kuat terhadap isu *comfort women*. Sebagai individu yang sangat akrab dengan masalah-masalah hak asasi manusia dan prinsip keadilan, Moon kemungkinan memiliki pemahaman mendalam mengenai urgensi untuk memperjuangkan hak-hak korban *comfort women*, memberikan mereka keadilan, serta menuntut pemerintah Jepang untuk bertanggung jawab atas tindakan masa lalu.

DINAMIKA KOMPLEKSITAS ISU *COMFORT WOMEN* DI KOREA SELATAN (1992-2015)

Isu *comfort women* bermula selama Perang Dunia II, terutama ketika Jepang menjajah sejumlah wilayah di Asia. Korea Selatan, yang dikuasai oleh Jepang dari tahun 1910 hingga 1945, merupakan tempat asal sebagian besar *comfort women*, dengan perkiraan jumlah korban dari Korea mencapai sekitar 80% dari total *Comfort Women* yang ada. Dilaporkan bahwa ada sekitar 200.000 wanita Korea yang menjadi korban *comfort women* selama masa penjajahan (Min, 2003). Saat itu, Jepang mendirikan *comfort station*, yaitu tempat prostitusi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan seksual para tentaranya. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, isu *comfort women* mulai tenggelam dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah Korea Selatan. Namun, para korban dan keluarga mereka tidak menerima ketidakadilan ini dengan diam. Mereka merasa bahwa kebenaran tentang kejahatan masa lalu harus diungkapkan, dan pemerintah Jepang harus meminta maaf atas pelanggaran HAM dan norma kemanusiaan yang terjadi (Jonsson, 2020). Mereka melihat penculikan wanita untuk dijadikan budak seks selama perang sebagai tindakan yang sangat tidak etis dan merasa bahwa Jepang telah melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum humaniter.

Pengangkatan isu *comfort women* dimulai pada tahun 1992 di Korea Selatan, diprakarsai oleh Kim Hak Sun dan sejumlah mantan *comfort women*. Mereka memulai gerakan yang dikenal sebagai "Wednesday Demonstration," dimana para korban dan pendukung mereka berkumpul setiap hari Rabu di depan kantor kedutaan besar Jepang di Seoul. Tujuan utama dari demonstrasi ini adalah untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat serta komunitas internasional terkait isu *comfort women*. Demonstrasi ini menandai titik awal dari perjuangan para korban untuk mencari keadilan, meminta pertanggungjawaban, dan meminta permintaan maaf dari pemerintah Jepang atas penderitaan yang mereka alami selama Perang Dunia II (Soh, 1996).

Tuntutan ini mendapat respons positif dari pemerintah Korea Selatan, yang kemudian mendesak komunitas internasional untuk meminta Jepang bertanggung jawab atas tindakan tidak adil yang telah dilakukan oleh pemerintah mereka terhadap lebih dari 200 ribu wanita yang menjadi korban kejahatan perang Jepang yang dijadikan sebagai budak seks oleh tentara Jepang. Pada tahun 1995, Perdana Menteri Jepang Tomiichi Murayama secara resmi meminta maaf kepada semua korban kejahatan perang Jepang di masa lalu (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 1995). Namun, tindakan ini masih tidak memenuhi harapan pemerintah Korea Selatan, yang menuntut Jepang untuk secara resmi meminta maaf kepada semua korban dan memberikan kontribusi finansial untuk membantu dalam pemulihan para korban yang telah kehilangan hak-hak mereka akibat tindakan pemerintah Jepang. Pada tahun 2014, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menolak untuk mengulangi permintaan maaf Jepang kepada korban kejahatan perang Jepang dengan alasan bahwa korban penculikan yang dijadikan budak seks oleh tentara Jepang merupakan tindakan oknum Jepang yang bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi dengan menjual wanita kepada para tentara, dan bukan tindakan pemerintah Jepang (Reuters, 2014).

Sejak tahun 1992, pemerintah Korea Selatan telah aktif dalam upaya diplomasi dengan tujuan mengangkat isu yang terkait dengan korban kejahatan perang Jepang ke panggung internasional. Upaya ini mencakup penggerakan media dan bahkan pembuatan sebuah patung yang menggambarkan seorang gadis yang mengenakan *hanbok*, dengan bayangan perempuan tua di bawah kakinya (BBC, 2017). Patung ini

menjadi simbol perbudakan seksual yang dialami selama masa penjajahan Jepang dan dipasang di depan Kedutaan Besar Jepang di Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan juga mengancam untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Jepang jika tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh pemerintah Jepang. Tekanan dari Korea Selatan mendapat dukungan dari komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat, yang juga mendesak Jepang untuk menghadapi sejarah masa lalu mereka dengan jujur. Akibatnya, pemerintah Jepang akhirnya menyerah dan merespons tuntutan yang diajukan oleh pemerintah Korea Selatan (J. A. Lee, 2015).

Pada tahun 2015, Jepang dan Korea Selatan akhirnya mencapai kesepakatan historis untuk menyelesaikan isu *comfort women* melalui *Comfort Women Agreement*. Kesepakatan ini melibatkan kewajiban Korea Selatan untuk mengelola dana kontribusi dari pemerintah Jepang dengan mendirikan sebuah yayasan yang disebut *Reconciliation and Healing Foundation*. Yayasan ini bertugas memberikan dukungan kepada semua mantan *comfort women* dalam proses penyembuhan luka psikologis mereka (Haggard, 2015). Namun, meskipun *Comfort Women Agreement* dan pendirian yayasan ini dianggap sebagai langkah penting dalam penyelesaian isu tersebut, respons terhadapnya di Korea Selatan tidak semuanya positif. Demonstrasi dan protes dari masyarakat serta para korban *comfort women* terjadi sebagai bentuk ketidakpuasan mereka terhadap kesepakatan tersebut, dan akhirnya yayasan tersebut dibubarkan.

ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI MOON JAE IN TERHADAP JEPANG DALAM ISU COMFORT WOMEN

Berikut ini merupakan beberapa kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Moon Jae In dalam isu *comfort women* terhadap pemerintah Jepang. Penulis akan menganalisis masing-masing dari kebijakan ini melalui konsep dua orientasi kebijakan dari konsep *predominant leader*:

1. Pendaftaran Sejarah *comfort women* dalam "Memory of the World" UNESCO

Moon berpendapat bahwa isu *comfort women* tidak dapat diselesaikan melalui jalur diplomatik dalam bentuk perjanjian bilateral. Ia memiliki visi yang kuat dan gagasan tentang pentingnya mencapai keadilan sejarah terkait *comfort women* dan tindakan Jepang selama Perang Dunia II. Oleh karena itu, selama kampanye politiknya, ia berkomitmen untuk meninjau kembali perjanjian yang telah dibuat pada masa pemerintahan sebelumnya. Pendekatan dan visi Moon mencerminkan orientasi kepemimpinan "*goal driven*" dengan fokus pada tindakan konkret terhadap isu *comfort women*. Namun, Moon juga menghadapi kendala politik yang signifikan, di mana perjanjian bilateral telah ada dan kedua negara telah sepakat untuk tidak membahas ulang isu ini setelah kesepakatan pada tahun 2015.

Adanya keterbatasan dalam meninjau ulang perjanjian tersebut, pemerintahan Korea Selatan di bawah Moon Jae In mencoba mengambil tindakan lain. Salah satunya adalah ancaman untuk mendaftarkan dokumen terkait isu perbudakan seksual ini ke program "Memory of the World" UNESCO (Shin, 2021). Tindakan ini mencerminkan respons yang lebih "*situationality responsive*," di mana Moon berusaha beradaptasi dengan situasi yang kompleks dan mencoba memanfaatkan forum internasional seperti UNESCO untuk memajukan tujuannya

agar sejarah Comfort Women diabadikan sebagai bagian dari sejarah yang tak terlupakan dan tak termaafkan.

Kebijakan Moon tersebut kemudian memicu kekecewaan dari Menteri Luar Negeri Jepang, Fumio Kishida, yang berpendapat bahwa hal ini bertentangan dengan tujuan asli UNESCO dalam mempromosikan persahabatan dan pemahaman antar-negara anggota. Pemerintah Jepang merasa bahwa Korea Selatan telah melanggar perjanjian yang sifatnya sudah final dan tidak dapat dirubah oleh kedua negara. Sehingga terjadi perselisihan sengit antara kedua negara dalam proses pendaftaran arsip sejarah ini. Pada tahun 2017, akhirnya UNESCO memutuskan untuk menunda pendaftaran arsip mengenai "comfort women" dalam daftar "Memory of the World," dengan mempertimbangkan ketidaksepakatan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berkepentingan. Keputusan ini dianggap sebagai kemenangan bagi pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang dianggap telah menggunakan pengaruhnya sebagai kontributor terbesar (9% dari anggaran UNESCO) untuk menekan dan menghentikan pendaftaran bahan arsip tersebut (Cho, 2017).

2. Tuntutan Ganti Rugi terhadap Perusahaan Jepang

Banyaknya tuntutan yang diajukan oleh mantan pekerja paksa dan korban *comfort women* juga menjadi pemicu perang dagang antara Korea Selatan dan Jepang. Presiden Moon menunjukkan sifat "*goal driven*" dengan mendukung para korban *comfort women* dan pekerja paksa, serta memiliki visi kuat tentang keadilan sejarah dan kompensasi bagi mereka, yang mencerminkan pendekatan "the crusaders" atau "the ideologues." Moon memotivasi para korban untuk mengejar keadilan dan kompensasi dari pemerintah Jepang dan perusahaan-perusahaan Jepang yang terlibat. Ini menunjukkan dedikasi yang kuat terhadap misi dan visinya.

Moon juga menunjukkan kepemimpinan "*situationality responsive*" dengan memanfaatkan sistem hukum Korea Selatan untuk memastikan bahwa tuntutan para korban mendapatkan perhatian. Pemerintah Korea Selatan telah berusaha untuk memperkuat peran negara dalam mendukung para korban dan memastikan bahwa tuntutan mereka diperhatikan. Para korban *comfort women* dan pekerja paksa asal Korea Selatan yang dipaksa bekerja di perusahaan-perusahaan Jepang selama Perang Dunia II mengajukan tuntutan hukum terhadap perusahaan-perusahaan Jepang yang terlibat. Pada tahun 2018 dan awal 2019, Mahkamah Agung Korea Selatan memutuskan bahwa tiga perusahaan Jepang, yaitu *Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation*, *Mitsubishi Heavy Industries*, dan *Nachi-Fujikoshi Corporation*, harus membayar kompensasi kepada para korban (VOA Indonesia, 2018).

Keputusan Mahkamah Agung ini menyebabkan ketegangan antara Korea Selatan dan Jepang, karena pemerintah Jepang merasa bahwa isu kompensasi ini sudah diselesaikan melalui kesepakatan bilateral sebelumnya. Meskipun pada dasarnya perjanjian tidak dapat ditinjau ulang untuk kemudian dibatalkan, Mahkamah Agung Korea Selatan tetap melayangkan tuntutan terhadap perusahaan Jepang dan memutuskan perjanjian karena dianggap klaim terkait kompensasi tidak tunduk pada ketentuan perjanjian karena seharusnya individu

yang menjadi korban bisa mengajukan tuntutan di luar perjanjian. Jepang merasa diberatkan atas tuntutan tersebut karena akan sangat memberatkan anggaran negara jika harus memberikan kompensasi kepada para korban.

Hingga pada tanggal 2 Agustus 2019, Jepang menolak untuk terlibat ke dalam diskusi mengenai tuntutan tersebut dan merespons keputusan Mahkamah Agung Korea Selatan dengan mengumumkan penghapusan Korea Selatan dari "Whitelist" yang merupakan daftar negara yang mendapatkan fasilitas perdagangan khusus dengan Jepang (Sugiyama, 2019). Tindakan ini membuat ekspor barang-barang tertentu dari Jepang ke Korea Selatan menjadi lebih sulit dan mengganggu aliran perdagangan kedua negara.

3. Pengunduran Diri dari GSOMIA & Aksi Pemboikotan

Presiden Moon Jae In mengumumkan penarikan diri Korea Selatan dari *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA) sebagai tanggapan terhadap tindakan Jepang dalam mengeluarkan Korea Selatan dari daftar "Whitelist" dan meningkatnya ketegangan sejarah serta perdagangan antara kedua negara (Gracellia, 2020). Penarikan dari GSOMIA menandakan bahwa Korea Selatan tidak lagi ingin berbagi informasi keamanan dengan Jepang. Moon Jae In menunjukkan ciri-ciri pemimpin yang memiliki tujuan yang kuat atau "goal driven", mencerminkan keyakinannya bahwa kerjasama keamanan regional dengan Jepang tidak dapat dilanjutkan dalam situasi ketegangan sejarah dan perdagangan yang signifikan. Hal ini menggambarkan komitmen Moon untuk melindungi kepentingan nasional dan mencapai tujuan strategisnya dalam konteks geopolitik yang dinamis. Moon juga menunjukkan kemampuan untuk merespons situasi dengan cepat dan sesuai konteks, mencerminkan sifat pemimpin "situationality responsive." Moon melakukan evaluasi situasi hubungan bilateral dengan Jepang dan meresponsnya secara kontekstual melalui tindakan penarikan GSOMIA.

Selain itu, tindakan ini diikuti oleh boikot terhadap berbagai produk, pariwisata, dan mode gaya Jepang yang dikenal dengan slogan "*I Will Not Buy, I Will Not Go, and I Will Not Wear*" sebagai ekspresi ketidaksetujuan terhadap tindakan Jepang (Kasulis, 2019). Imperialisme Jepang terhadap negara-negara di kawasan memberikan warisan sejarah berupa kondisi traumatis dan rasa benci, namun keadaan seperti ini juga tidak jarang dipolitisasi oleh elit politik, seperti dalam konteks penarikan diri Korea Selatan dari GSOMIA yang juga berawal dari sejarah masa lalu atau historical animosity kemudian berimplikasi terhadap berbagai aspek atau isu seperti comfort women, penyelesaian kompensasi bagi buruh pada masa perang, pemboikotan produk Jepang oleh masyarakat Korea Selatan dan bentuk-bentuk sentimen lainnya.

4. Pembubaran *The Reconciliation and Healing Foundation*

The Reconciliation and Healing Foundation adalah sebuah lembaga atau yayasan yang bertugas untuk mendistribusikan dana kompensasi yang diberikan oleh pemerintah Jepang kepada para korban *comfort women*. Namun, Presiden Moon mengambil langkah tegas dengan menghentikan operasi yayasan tersebut. Pada 27 November 2018, Pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk membubarkan *The Reconciliation and Healing Foundation*.

Keputusan ini mencerminkan kepemimpinan yang berorientasi pada tujuan, menggambarkan tekad kuat Moon Jae In untuk mencapai hasil yang lebih memuaskan bagi para korban *comfort women* dan masyarakat Korea Selatan secara keseluruhan. Keputusan pembubaran ini mungkin merupakan respons terhadap tekanan dan kritik keras dari masyarakat Korea Selatan, termasuk kelompok hak asasi manusia dan para korban *comfort women* yang menganggap bahwa *Comfort Women Agreement 2015* tidak memadai dan yayasan tersebut tidak berhasil memenuhi tujuannya. Moon ingin memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahnya benar-benar mencerminkan pengakuan terhadap penderitaan para korban dan memberikan kompensasi yang layak (Yi & Kim, 2018). Moon Jae In memutuskan untuk menggantikan seluruh dana dari Jepang dengan dana pemerintah Korea Selatan sendiri. Moon Jae In juga menunjukkan kemampuan untuk merespons situasi dengan cepat dan sesuai konteks. Dia mendengarkan keluhan dan tuntutan yang ia terima dari para korban *comfort women* dan masyarakat Korea Selatan mengenai jumlah kompensasi yang dianggap tidak memadai. Tindakan Moon dalam membubarkan yayasan adalah respons terhadap perasaan dan tuntutan ini. Hal ini mencerminkan ketidakpuasannya terhadap kesepakatan sebelumnya dan niatnya untuk mencari solusi yang lebih baik dalam konteks yang berubah.

Kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran di Jepang, bahkan Partai Liberal Demokrat di Jepang mengeluarkan resolusi yang mengkritik langkah tersebut dan meminta pemerintah Korea Selatan menarik kembali keputusannya. Pemerintah Jepang tentu tidak dapat menerima kebijakan pembubaran tersebut, karena dana yang telah diberikan kepada para korban telah menjadi titik fokus dari penyelesaian akhir isu *comfort women*. Pengembalian dana tersebut akan memberikan Jepang tugas tambahan untuk kembali berbicara dengan Korea Selatan mengenai formalitas permintaan maaf dan kompensasi (Kang, 2018).

KESIMPULAN

Dalam menganalisis kebijakan Presiden Moon Jae In terkait isu *comfort women*, dapat disimpulkan bahwa Moon adalah seorang predominant leader dengan ciri khas kepemimpinan yang berorientasi pada tujuan (*goal-driven*) dan responsif terhadap situasi (*situationality responsive*). Pendekatannya yang berorientasi pada tujuan terlihat dalam tekadnya untuk mencapai keadilan sejarah dan kompensasi bagi para korban *comfort women*. Moon memegang teguh visinya untuk mengatasi isu ini, dan pendekatannya mencerminkan sifat seorang "crusader" atau "ideologue" yang memiliki keyakinan dan semangat kuat untuk mencapai tujuannya. Di sisi lain, Moon juga menunjukkan responsivitas terhadap situasi yang berkembang, seperti terlihat dalam penggunaan forum internasional seperti UNESCO untuk mengangkat isu *comfort women* dan pengambilan keputusan cepat dalam menarik diri dari GSOMIA sebagai respons terhadap ketegangan dengan Jepang. Hal ini mencerminkan sifat *situationality responsive* yang pragmatis dan adaptif dalam menghadapi dinamika hubungan internasional.

Namun, kebijakan-kebijakan Moon juga menimbulkan ketegangan bilateral dengan Jepang, terutama terkait pembubaran *The Reconciliation and Healing*

Foundation yang dianggap melanggar kesepakatan sebelumnya. Konflik ini menunjukkan kompleksitas penanganan isu sejarah dan politik sensitif antara kedua negara. Sebagai pemimpin Korea Selatan, Moon Jae In terus berusaha memperjuangkan keadilan bagi para korban *comfort women* dan merespons dinamika hubungan bilateral dengan Jepang. Kebijakan-kebijakannya mencerminkan tantangan dalam menyelesaikan isu sejarah yang masih memicu ketegangan regional. Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri Moon memainkan peran penting dalam menentukan arah hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang, serta dampaknya terhadap masyarakat dan para korban *comfort women*.

REFERENSI

- Arrington, C. (2018, January 11). *South Korea ended its review of its 'comfort women' deal with Japan. Here's what you need to know*. The Washington Post. <https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/01/11/south-korea-ended-its-review-of-its-comfort-women-deal-with-japan-heres-what-you-need-to-know/>
- Asahi Digital. (2014, August 22). *Issue became pressing matter again after decision by Constitutional Court of Korea*. <https://www.asahi.com/articles/ASG8L6G74G8LULPT010.html>
- BBC. (2017, November 23). *San Francisco accepts "comfort women" statue*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-42092477>
- BBC News. (2015). *Japan and South Korea agree WW2 "comfort women" deal*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-35188135>
- Cho, K. (2017, November 1). *UNESCO postpones registration of comfort women archival materials due to pressure from Japanese government*. The Hankyoreh. https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/817040.html
- Debates, R. (2022, August 6). *"Comfort Women" issue and its impact on Japan-South Korea relations*. Observer Research Foundation. <https://www.orfonline.org/expert-speak/comfort-women-issue-and-its-impact-on-japan-south-korea-relations>
- Gracellia, J. (2020). Implikasi Penanganan Masalah Comfort Women terhadap Hubungan Jepang dan Korea Selatan pada Tahun 2015-2019 [The Impact of Resolving the Comfort Women Issue to Japan And South Korea Relations during 2015 - 2019]. *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)*, 11(21), 44. <https://doi.org/10.19166/verity.v11i21.2451>
- Haggard, S. (2015, December 28). *The Comfort Women Agreement*. Peterson Institute for International Economics. <https://www.piie.com/blogs/north-korea-witness-transformation/comfort-women-agreement>
- Hermann, M. G., Preston, T., Korany, B., & Shaw, T. M. (2001). Who Lead Matters: The Effect of Powerfull Individuals. *International Studies Review*, 3(2), 83–131. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1521-9488.00235>
- Jonsson, G. (2020). Can Memories of the Japan-Korea dispute on "Comfort Women" Resolve the Issue? *International Journal of Korean Studies*, XXIII(2), 64–80. <https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1510256&dswid=-4932>
- Jung, M. (2017, May 14). *Moon Jae-in: Son of war refugees rises to power*. The Korea Times. <https://www.koreatimes.co.kr/www2/common/viewpage.asp?newsIdx=229029&categoryCode=356>

- Kang, H. M. (2018, November 27). *South Korea Decides to Dismantle 'Comfort Women' Reconciliation and Healing Foundation*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2018/11/south-korea-decides-to-dismantle-comfort-women-reconciliation-and-healing-foundation/>
- Kasulis, K. (2019, August 12). *South Korea's "No Japan" boycott is new. But the wounds are old*. The World. <https://theworld.org/stories/2019-08-12/south-korea-s-no-japan-boycott-new-wounds-are-old>
- Kim, H. (2015). *Contending Narratives on the "Comfort Women" Issue in South Korea and Japan*. <https://paperzz.com/doc/7646919/contending-narratives-on-the-comfort-women-issue-in-sou...>
- Lalitya, G. K. (2020). Analisis Sikap yang Diambil oleh Pemerintah Korea Selatan pada Masa Presiden Park Geun Hye Terkait dengan Isu Comfort. *Journal of International Relations UNDP*, 6(4), 639–648. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/download/28875/24501>
- Lee, J. A. (2015, April 26). *Abe's US Visit to Focus on Controversial Statements*. VOA News. <https://www.voanews.com/a/abes-us-visit-to-focus-on-controversial-statements/2735012.html>
- Lee, K. (2017). *The Comfort Women Agreement: An Analysis of The Motivations that Led to Park Geun-Hye's Acquiescence* [Georgetown University]. https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/1043803/Lee_georgetown_0076M_13544.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Min, P. G. (2003). Korean "Comfort Women": The Intersection of Colonial Power, Gender, and Class. *Gender & Society*, 17(6), 938–957. <https://doi.org/10.1177/0891243203257584>
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (1995). *Statement by Prime Minister Tomiichi Murayama "On the occasion of the 50th anniversary of the war's end"*. <https://www.mofa.go.jp/announce/press/pm/murayama/9508.html>
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2015, November 24). *Press Conference by Foreign Minister Fumio Kishida*. https://www.mofa.go.jp/press/kaiken/kaiken3e_000011.html
- Mosler, H. B. (2017). *President Moon Jae-in – The Right Choice for South Korea* (Bertelsmann Stiftung (ed.)). <https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/president-moon-jae-in-the-right-choice-for-south-korea>
- Reuters. (2014, March 14). *Japan's Abe says won't alter 1993 apology on "comfort women."* <https://www.reuters.com/article/us-japan-korea-idUSBREA2D04R20140314>
- Ser, M. (2012, August 14). *Lee tells Japanese emperor to apologize*. Korea JoongAng Daily. <https://koreajoongangdaily.joins.com/2012/08/14/politics/Lee-tells-Japanese-emperor-to-apologize/2957923.html>
- Soh, C. S. (1996). The Korean "Comfort Women": Movement for Redress. *Asian Survey*, 36(12), 1226–1240. <https://doi.org/10.2307/2645577>
- Soh, C. S. (2003). Japan's National/Asian Women's Fund for "Comfort Women." *Pacific Affairs*, 76(2), 209–233. <http://www.jstor.org/stable/40024391>
- Sugiyama, S. (2019, August 2). *Japan officially approves scrubbing South Korea from "white list" of countries*. The Japan Times. <https://www.japantimes.co.jp/news/2019/08/02/business/japan-officially-approves-removing-south-korea-white-list-countries/>

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- The Straits Times. (2017, May 11). *South Korea president Moon Jae In's main policy pledges*. <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/south-korean-presidential-shoo-in-moon-jae-ins-main-policy-pledges>
- VOA Indonesia. (2018, November 29). *Perusahaan Jepang Diperintahkan Bayar Ganti Rugi Tenaga Kerja Paksa Korsel*. <https://www.voaindonesia.com/a/perusahaan-jepang-diperintahkan-bayar-ganti-rugi-tenaga-kerja-paksa-korsel-/4679547.html>
- VOA Indonesia. (2020, August 14). *Korsel Upayakan Solusi Bagi Korban Perbudakan Seksual Jepang*. <https://www.voaindonesia.com/a/korsel-upayakan-solusi-bagi-korban-perbudakan-seksual-jepang-/5543501.html>
- Yi, H., & Kim, J. (2018, November 22). *Dissolution of the Reconciliation and Healing Foundation According to the Wishes of the Comfort Women Victims*. The Kyunghan Shinmun.
https://english.khan.co.kr/khan_art_view.html?artid=201811221709077&code=710100